

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yaitu suatu Permasalahan yang sedang dihadapi di Indonesia saat ini. Kemiskinan itu sendiri yaitu suatu keadaan ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, baik dalam keadaan kondisi fisik maupun kondisi ekonomi. Kemiskinaan disebabkan oleh bermacam faktor dan penyebab lainnya yaitu sumber daya manusia yang masih kurang memadai. Yang mana hal tersebut dapat berakibat pada tidak terpenuhinya sandang, pangan serta papan untuk manusia itu sendiri.

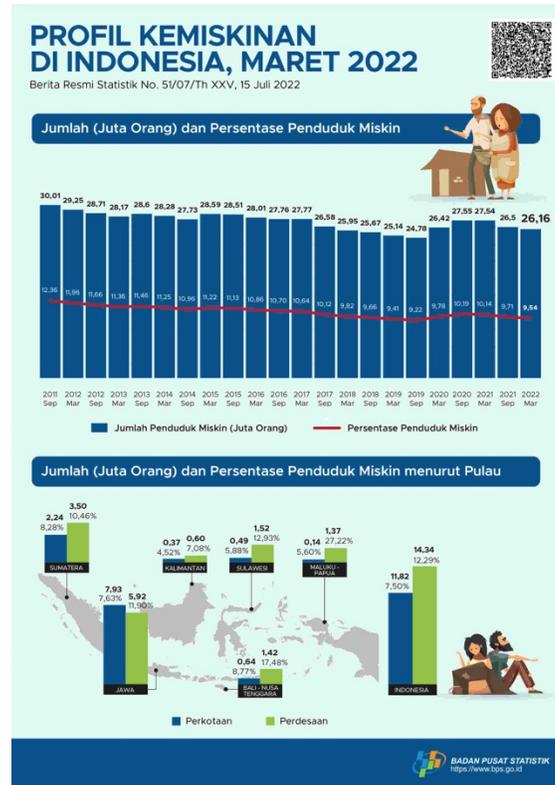
Faturachman dan Marcelinus Molo dalam (Matana, 2020) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang dalam satu rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup makanan bergizi, pendidikan yang memadai, hunian yang layak, akses pelayanan kesehatan yang baik, pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang optimal, serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat secara aman.

Kemiskinan merupakan keadaan di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat luas, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan sebagai bentuk nyata kehadiran dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya (Fatimah et al., 2022)

Kemiskinan menurut (Suparlan, 1984), didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Berdasarkan hasil data badan pusat statistik (BPS) mendata secara meluruh bahwa terdapat terdapat sekitar 26,16 juta orang masyarakat indonesia yang masih masuk tergolong kedalam kategori penduduk miskin pada periode maret 2022 sekitar 9,54 persen dari jumlah seluruh penduduk di indonesia.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2011-2022



Sumber data: Badan Pusat Statistik Indonesia 2022

Dari data diatas dapat memaparkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2020 periode awal sejumlah 26,42 juta jiwa dengan persentase 9,78 persen mengalami kenaikan jumlah angka kemiskinan pada periode kedua di bulan september 2020 dengan perubahan menjadi 27,55 juta jiwa dan dalam presentase 10,19 persen dimana mengartikan bahwa ada nya peningkatan sebanyak 1,13 juta jiwa angka kemiskinan, kemudian dari tahun selanjutnya jumlah angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2022 periode awal angka kemiskinan menjadi 26,16 juta jiwa dengan persentase 9,54 persen

Dengan adanya covid-19 yang mana virus ini seperti yang bisa diketahui menyerang seluruh manusia yang ada dibumi, terutama di Indonesia menyebabkan banyaknya gelombang phk besar-besaran akibat dari pengurangan pegawai oleh perusahaan dikarenakan omset yang menurun selama pandemi covid 19 ini berlangsung

Terkhusus di Kota Bandung itu sendiri. Pada akhirnya mengakibatkan peningkatan pengangguran ditengah masyarakat, yang mana hal ini juga berakibat

tersebut berakibat pada timbulnya cluster penduduk miskin baru dikota Bandung ini. Yang berakibat pula pada peningkatan pencatatan masyarakat miskin di Indonesia.

Kemiskinan khususnya di kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022, ditinjau dari data BPS (Badan Pusat Statistik, 2022) kota Bandung pada akhir tahun 2022 ini angka kemiskinan berada diangka 109,820 jiwa, sedangkan pada tahun 2021 angka kemiskinan berada diangka 112.500 jiwa, kemudian pada tahun 2020 angka kemiskinan sejumlah 100.020 jiwa, dimana bisa di tinjau bahwa adanya kenaikan jumlah kemiskinan di kota Bandung dari tahun 2020-2021 sejumlah 12480 jiwa, dan pada akhir 2022 mengalami penurunan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 2680 jiwa.

Tabel 1.1 Indikator Kemiskinan

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan		
	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	500452.0 0	515396.0 0	545675,0 0
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	100.02	112.50	109,82
Persentase Penduduk Miskin	3.99	4.37	4,25
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.61	0.78	0,70
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.13	0.24	0,17

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Jika dilihat dari Tabel 1.1 dari tahun 2020-2022 Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun diakibatkan dari harga bahan pangan yang selalu naik, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh bagi penduduk yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian dalam jumlah penduduk miskin jika ditinjau dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang diakibatkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaannya karena adanya pandemi covid-19. kemudian pada tahun selanjutnya 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, Dan dalam hal indeks kemiskinan jika dilihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan dan penurunan yang

kemiskinan semakin dalam. Kemudian bisa dilihat juga bahwasannya indeks keparahan mengalami naik turun dari tahun ke tahun dan diujung tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, indeks yang paling merosot kemiskinan mencirikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dan melihat dari permasalahan yang dialami, pemerintah memberlakukan program bantuan kepada masyarakat miskin, dimana program bantuan tersebut dimulai dengan nama program Ranstra terdahulu, maka mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pemerintah mulai melakukan perubahan kerangka bantuan untuk masyarakat kurang mampu yakni dari Program Rastra menjadi BPNT, dalam rangka untuk mendukung penyaluran bantuan yang telah dirancang sedemikian rupa tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 mengenai Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Indonesia, 2017). Kemudian disusul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Sosial, 2018). Dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai (Menteri Sosial, 2019). Dan pada tahun 2021 ditetapkan peraturan baru yaitu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Sosial, 2021).

Bantuan Pangan Non Tunai atau biasa disebut dengan BPNT sebuah program bantuan pangan atau makanan yang mana dikemas dalam bentuk non tunai, yang mana sarannya yakni para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan setiap bulan melalui sistem akun elektronik, yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang atau e-warong yang telah bermitra dengan bank Himbara. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi KPM dan meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap asupan gizi yang memadai. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Sukapura,

Pada tahun 2020, pemerintah melakukan pengembangan terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program Sembako guna memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pangan. Dalam program ini, nilai bantuan yang semula Rp110.000 per Keluarga Penerima

dinaikkan menjadi Rp200.000 per KPM per bulan. Program Sembako juga memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli, tidak lagi terbatas pada beras dan telur seperti pada program sebelumnya. Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan akses lebih baik terhadap pangan bergizi bagi KPM serta sebagai bagian dari langkah pencegahan stunting. Selain peningkatan nilai bantuan, cakupan penerima manfaat juga diperluas, dari 15,6 juta menjadi 18,8 juta KPM pada tahun yang sama (Kementerian Sosial RI, 2025)

Tabel 1.2 Saldo Bpnt

Saldo bpnt 200rb/bulan	
=jenis bahan pangan	
Beras	Daging Ayam/ Ikan segar
Telur	Buah-Buahan
Sayur Mayur	Kacang-kacangan

Sumber data: Kementerian Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan setiap Keluarga Penerima Manfaat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai ini bisa mendapatkan subsidi sebesar 200 ribu rupiah per bulan yang langsung di transfer oleh kemensos kedalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa langsung ditukarkan menjadi bahan pokok melalui agen-agen E-warong yang sudah tersedia diwilayah domisili penerima bantuan yang dimana dengan saldo 200 ribu rupiah yang diterima oleh penerima manfaat bisa ditukarkan menjadi bahan makanan seperti beras, telur, daging, sayuran dan buah buahan, yang mana bantuan sosial panganini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Pada awal tahun 2022, pencairan saldo Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak lagi dilakukan melalui e-warong dalam bentuk bahan pangan, melainkan disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui PT Pos Indonesia, dengan sistem rapel tiga bulanan sebesar Rp600.000. Kebijakan pencairan BPNT/kartu sembako secara tunai ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya di berbagai daerah. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa banyak KPM menerima bantuan dalam bentuk paket yang tidak sesuai kebutuhan padahal seharusnya KPM diberi

memenuhi standar. Perubahan mekanisme ini ditujukan untuk mempercepat proses penyaluran bantuan di awal tahun 2022. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran pemerintah dalam rangka mempercepat distribusi bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Portal Informasi Indonesia, 2022)

Tabel 1. 3 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat(KPM) Bantuan Sosial di Kota Bandung

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Kota Bandung		
	2021	2022	2023
BPNT	90.425	95.282	97.469
PKH	44.360	46.820	458.770
PBI- JK	360.655	416.832	46.268

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Berdasarkan data hasil diatas jumlah penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di kota bandung dari tahun 2021 sejumlah 90.425 ribu, kemudian pada tahun 2022 jumlah penerima manfaat mengalami kenaikan menjadi 95.282 ribu, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 97469 ribu penerima manfaat, dari data yang dapat dipahami diatas menjelaskan bahwa penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, data bantuan sosial lainnya yang membantu memperlihatkan bahwa masa pandemi covid-19 sangat berdampak kepada kehidupan perekonomian warga kota Bandung yaitu penerima manfaat PKH dan PBI JK(jaminan Kesehatan) mengalami kenaikan di waktu yang sama, dengan dibuktikan peningkatan jumlah penerima manfaat disegala jenis bantuan pada tahun tersebut, yang dapat mengindikasikan bahwa pada tahun 2021 sampai tahun 2022 tersebut kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu disebabkan pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat kota bandung menjadi masyarakat rentan miskin/ dikarenakan banyaknya phk dan pengangguran baru yang menyebabkan munculnya masyarakat miskin baru yang

Keadaan tersebut dikarenakan adanya pandemic yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan diseluruh wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang terdampak dari pandemi covid-19 ini yaitu kelurahan Sukapura. Akibat pandemi Covid-19 warga kelurahan Sukapura banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, namun ada beberapa permasalahan yang didapatkan peneliti berdasarkan informasi dilapangan, seperti dalam hal pemberian Bantuan Pangan Non Tunai, seperti warga yang ingin mengajukan penerima bantuan khususnya BPNT harus mengajukan DTKS terlebih dahulu, lalu untuk menunggu keluar SK surat keputusan DTKS dari kemensos yang memerlukan waktu hampir 1 tahun dikarenakan proses penerbitan menjadi penerima bantuan di DTKS memerlukan waktu yang lumayan lama . Kemudian permasalahan yang kedua yaitu dalam penyaluran bantuan masih ada permasalahan seperti ketidak tepatan sasaran dalam pemberian bantuan, seperti warga yang memang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi tidak mendapatkannya sama sekali dan bahkan warga yang bisa dikatakan mampu dan seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut malah mendapatkan.

Kemudian Permasalahan yang ketiga yaitu dalam penyesuaian validasi data dari pihak kelurahan dengan data yang berada di lapangan dikarenakan ada beberapa penerima bantuan yang pindah domisi tetapi tidak melapor kepihak pejabat kelurahan setempat, kemudian ada penerima bantuan yang seharusnya berganti status penerimannya karena kondisi ekonomi yang sudah membaik akan tetapi warga penerima bantuan tersebut tidak mengganti status penerima bantuan yang seharusnya bisa digantikan kepada penerima baru/yang belum pernah menerima bantuan BPNT.

Tabel 1.4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat(KPM) Bantuan Sosial di Kecamatan Kiaracandong

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Kecamatan Kiaracandong		
	2021	2022	2023
BPNT	5200	5119	5200

Berdasarkan data hasil diatas penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk warga kecamatan Kiaracondong dari tahun 2021 sejumlah 5200 penerima manfaat dan untuk tahun 2022 sejumlah 5119 dan pada tahun 2023 penerima bantuan sejumlah 5200, dari data diatas menjelaskan bahwa penerima bantuan pada tahun 2022 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021 dan 2023 yang jumlah penerima manfaat nya memilik jumlah penerima yang sama.

Tabel 1. 5 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Disetiap Kelurahan pada kecamatan kiaracondong

Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2021
Kelurahan Sukapura	715
Kelurahan Babakansari	669
Kelurahan kebonjayanti	562
Kelurahan Babakan Surabaya	429
Kelurahan Cicaheum	383
Kelurahan Kebon Kangkung	308
Jumlah	3066

Sumber Data : Kantor Kecamatan Kiaracondong (diolah peneliti 2025)

Berdasarkan data hasil diatas Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2021, Kelurahan Sukapura menjadi Kelurahan dengan Keluarga Penerima Manfaat paling banyak dari Kelurahan lainnya yang ada di kecamatan Kiaracondong, dengan kata lain Kelurahan Sukapura menjadi Kelurahan yang paling banyak masyarakat yang menerima bansos Bantuan Pangan Non Tunai ini pada tahun 2021

Ketika peneliti sedang melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di kelurahan Sukapura ada suatu program bantuan dari pemerintah khususnya dari Kementerian Sosial yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), banyak sekali warga yang memang ingin mendapatkan bantuan ini bahkan dari berbagai kalangan, dan berbondong-bondong mendaftarkan diri di kelurahan untuk mendapatkan bantuan tersebut, dimana pada masa itu banyak masyarakat yang

layak menerima bantuan tersebut dan hal tersebut menjadikan tanda tanya apakah pelaksanaan program bantuan ini terdapat permasalahan yang mengakibatkan ketidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, dengan judul:

“EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SUKAPURA KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan dari penelitian ini yaitu

1. Bertambahnya jumlah penduduk miskin dari tahun-ke tahun yang diakibatkan dari hilangnya pekerjaan selama masa pandemi covid-19
2. Dalam pelaksanaan program BPNT masih ada keluhan dari masyarakat, seperti penerima yang salah sasaran dan ini menjadi polemik disaat pembagian bantuan dilingkup masyarakat.
3. Kesesuaian data keluarga penerima manfaat (KPM) yang diinput dengan data yang dilapangan kadang berbeda, oleh sebab itu perlunya verifikasi (verifikasi dan validasi) data dilapangan oleh instansi kelurahan terkait, supaya data yang diinput oleh pemerintah sama dengan data yang berada dilapangan, untuk menghindari hal-hal atau kecurangan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di masyarakat.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) dalam penanggulangan kemiskinin pada masa pandemi covid di kelurahan Sukapura
2. Bagaimana Efisiensi atau usaha dalam proses pelaksanaan kebijakan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di kelurahan Sukapura
3. Bagaimana Kecukupan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Sukapura
4. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai di

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Sukapura

6. Bagaimana Ketepatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sukapura

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu,

1. Untuk mengetahui Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi covid di kelurahan Sukapura
2. Untuk mengetahui Efisiensi atau usaha dalam proses pelaksanaan kebijakan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di kelurahan Sukapura
3. Untuk mengetahui Kecukupan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Sukapura
4. Untuk mengetahui Pemerataan penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sukapura
5. Untuk mengetahui Responsivitas Masyarakat terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Sukapura
6. Untuk mengetahui Ketepatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sukapura

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar bisa memiliki manfaat dan bisa pula menambah wawasan serta juga menambah ilmu pengetahuan. Terutama pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi instansi terkait dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang

serupa tidak terulang pada pelaksanaan program berikutnya, khususnya di wilayah Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, terkait pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat program tersebut, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan bantuan secara optimal.

c. Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik serta menjadi dasar acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan studi lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) disaat pandemi covid-19 masuk ke indonesia membuat pemerintah mengucurkan dana dalam penanganan kemiskinan, khususnya dalam penanggulangan ketimpangan pangan diseluruh indonesia, namun peneliti berfokus pada pemelitian di lingkup kelurahan, yaitu di kelurahan Sukapura dan ingin mengetahui bagaimana Evaluasi Program BPNT yang sudah dijalankan Di kelurahan tersebut.

Worthen dan Sanders dalam buku (Ambiyar & Dewi, 2019)''menyatakan bahwa evaluasi sebagai kegiatan mendapatkan informasi yang berguna dalam menilai keberadaan suatu program serta cara alternatif yang disusulkan guna menggapai tujuan yang sudah ditentukan''. lalu untuk meneliti mengenai Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di kelurahan Sukapura kecamatan Kiaracandong Kota Bandung peneliti menggunakan indikator evaluasi program menurut ((Dunn, 2003)

b) Efisiensi

Dalam indikator Efisiensi membahas mengenai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

c) Kecukupan

Dalam indikator Kecukupan membahas mengenai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah

d) Perataan

Dalam indikator Perataan membahas mengenai apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda

e) Responsivitas

Dalam indikator Responsivitas membahas mengenai apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu

f) Ketepatan

Dalam indikator Ketepatan membahas mengenai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

Berikut peneliti sajikan gambar dari kajiann teori yang akan digunakan oleh peneliti:

